

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena kehidupan manusia yang menggambarkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Banyaknya persoalan kemiskinan identik dengan kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pakaian yang layak, tidak mampu mengendalikan sumber daya yang ada dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang lainnya. Secara kualitatif kemiskinan adalah kasus yang melibatkan banyak faktor, diantaranya dalam faktor sosial, budaya dan politik. Faktor lain yang mengakibatkan kemiskinan terus terjadi seperti pendidikan yang rendah, tidak dapat mengembangkan potensi diri, tidak memiliki keterampilan dan kemampuan diri untuk membangun usaha, sulitnya lapangan pekerjaan, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta mengalami kecacatan fisik.

Adanya permasalahan kemiskinan ini akan mengakibatkan dampak di berbagai bidang yang utamanya pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan sebab kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional yang artinya dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam, maka kemiskinan akan memiliki banyak dampak di berbagai aspek. Di bidang ekonomi jika kemiskinan cukup tinggi di suatu negara, maka daya beli masyarakat akan mengalami penurunan yang akibatnya produsen atau perusahaan tidak dapat menjual banyak dari barang dan jasa yang mereka miliki. Di bidang pendidikan kemiskinan berdampak pada jumlah angka anak putus sekolah yang meningkat, khususnya dari keluarga miskin, mengakibatkan kurangnya wawasan, keterampilan, dan pengetahuan yang layak untuk menunjang kehidupannya. Dan di bidang kesehatan kemiskinan akan berdampak pada rentannya terjangkit penyakit dan resiko terutama pada kesehatan ibu hamil karena kekurangan gizi akan mengakibatkan buruknya kondisi perkembangan kesehatan pada bayi dan tingkat kelahiran hidup berkurang.

Pengurangan angka kemiskinan sangatlah penting untuk dilakukan dan merupakan indikator utama dalam pembangunan negara guna menciptakan kesejahteraan, sebagaimana yang diinginkan oleh seluruh masyarakat, baik yang

hidup di perkotaan maupun di desa. Dalam kehidupannya, masyarakat dapat keluar dari kemiskinan jika mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mulai dari bekerja keras, dan dengan ini kehidupannya dapat dikatakan sejahtera. Namun tidak semua kehidupan yang dijalani masyarakat akan berjalan dengan kondisi yang sejahtera selamanya. Dalam hal ini mereka harus berupaya mencari cara untuk tetap hidup sejahtera.

Kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi dasar, yaitu: (1) Kondisi hidup atau sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial; (2) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial; (3) Aktivitas, yaitu suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera (Edi Suharto, 2009).

Kesejahteraan adalah tujuan untuk pembangunan nasional dari setiap negara yang ada, termasuk salah satunya negara Indonesia. Selain kemerdekaan negara, tercapainya masyarakat yang adil dan makmur merupakan bentuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan itu tidak mudah, akan tetapi bukan berarti mustahil untuk didapatkan, sebab perlunya usaha atau tindakan dalam prosesnya. Upaya mewujudkan kesejahteraan belum bisa dikatakan maksimal dengan adanya hambatan dan permasalahan yang dihadapi salah satunya Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, yaitu dari jumlah kemiskinan yang masih menjadi persoalan dalam proses peningkatan kesejahteraan negara. Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak, tercatat pada bulan Juni 2022 mencapai 275 juta jiwa. Dengan begitu luasnya Indonesia banyak masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan, tercatat tahun 2022 pada bulan Maret sebesar 26,16 juta penduduk miskin Indonesia. Dari data tersebut membuat permasalahan kemiskinan menjadi faktor kendala utama terkait dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia.

Dari permasalahan kemiskinan ini Indonesia banyak program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah yang menyentuh langsung khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini dalam upaya pemberdayaan masyarakat,

baik itu secara ekonomi maupun dalam aspek lainnya belum mampu memberikan dampak besar sehingga tujuan pembangunan nasional hingga saat ini masih menjadi masalah yang harus dihadapi. Oleh karena itu perlunya program atau kebijakan khusus dan bersinergi antar pemerintah baik pusat dengan pemerintah daerah, hingga desa, serta masyarakat dalam upaya mensejahterakan masyarakat kurang mampu.

Salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah guna menunjang permasalahan kemiskinan dengan dibentuknya sebuah program yang selanjutnya disebut Program Keluarga Harapan (PKH) dengan dasar Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program ini juga dilakukan oleh beberapa negara lainnya, salah satunya negara Amerika Serikat dengan penyebutan program *Conditional Cash Transfer (CCT)*, yang artinya bantuan tunai bersyarat. Maksud dari terbentuknya Program Keluarga Harapan ini bukan sebagai lanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang disalurkan dalam tujuan membantu keluarga miskin. Namun PKH ini secara khusus untuk upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin klaster terbawah yang memberikan bantuan tunai bersyarat, dan sebagai imbalannya penerima diwajibkan untuk memenuhi syarat kualifikasi tertentu di mana mereka adalah yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu kronis, rentan terhadap guncangan ekonomi, serta yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari aspek pendidikan dan kesehatan, yang sekaligus sebagai bentuk upaya pemutusan rantai kemiskinan yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Program Keluarga Harapan diarahkan sebagai *center of excellence* dalam upaya penanggulangan pada kemiskinan yang utamanya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan taraf hidup melalui bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin, memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya (fisik dan material), mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, memudahkan akses pelayanan yang layak dalam pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan multidimensional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan jika seseorang dianggap miskin apabila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yang diukur dari pengeluaran selama satu bulan. Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007 yang telah berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong kemandirian masyarakat penerima, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam berjalannya PKH ini mengalami beberapa kali perubahan yang pada Tahun 2013 terdapat perubahan pada bidang pendidikan yaitu penambahan komponen yang awalnya bantuan hanya mulai jenjang SD dan SMP maka saat ini hingga tingkat jenjang SMA. Jumlah besaran bantuannya pun meningkat setiap komonennya. Dan pada tahun 2015 terdapat penambahan bidang baru dalam penyaluran bantuan PKH, yaitu pada kesejahteraan sosial yang mulanya hanya bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang kesejahteraan sosial ini dibagi menjadi dua kategori penerima bantuan, yaitu untuk lansia usia 70 tahun keatas dan penyandang disabilitas berat. Pada bidang kesejahteraan sosial yang mencakup komponen lanjut usia dan penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka yang sudah tidak dapat lagi melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.

Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (2021) ialah program yang menyalurkan bantuan tunai bersyarat untuk masyarakat yang memiliki perekonomian kalangan bawah yang disebut juga dengan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang memenuhi syarat terkait dengan upaya peningkatan kualitas dalam SDM, yakni berupa pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) akan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat jangka pendek, masyarakat mendapat *income effect* dari PKH melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Sedangkan untuk jangka panjang, PKH diharapkan mampu memutus angka rantai kemiskinan antar generasi yang melalui peningkatan pendidikan anak, kepastian pendapatan anak dimasa depan, dan peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi anak. Menurut teori dan secara faktual

yang ada, tingkat angka kemiskinan pada keluarga secara umum terkait dengan kualitas dari kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan yang didapat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu kesehatan dan pendidikan.

PKH sebagai program perlindungan sosial yang berupaya memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak memiliki daya, sehingga diperlukan penguatan atau pemberdayaan agar warga negara tersebut memiliki daya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dilihat dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 Kabupaten Jember jumlah kemiskinan berjumlah 232,73 ribu jiwa, yang jumlah ini berkurang bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yaitu sebesar 257,09 ribu jiwa (Statistik & Jember, 2022). Melihat kondisi ini angka kemiskinan masih harus diatasi salah satunya melalui Program Keluarga Harapan, yang merupakan tindakan dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember, yang tersebar ke seluruh kecamatan atau kelurahan, kemudian tersalurkan ke masing-masing desa. Salah satunya di Kecamatan Kencong dengan empat desa, yaitu Desa Wonorejo, Desa Cakru, Desa Paseban, Desa Kraton.

Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember merupakan salah satu desa yang telah melaksanakan Program Keluarga Harapan ini sejak awal tahun digagas oleh Direktorat Jenderal Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kabupaten Jember yang kemudian diturunkan ke kecamatan dan desa pada tahun 2007, dengan jumlah penduduk desa tahun 2022 mencapai 11.446 jiwa terdapat 271 KK miskin. Awal dari pengadaan program ini dilaksanakan dengan mekanisme yang sudah ditetapkan, dengan jumlah penerima bansos PKH sebanyak 238 jiwa yang tersebar di empat dusun, yaitu Dusun Kraja, Dusun Tempuran, Dusun Igir-Igir, Dusun Gondangrejo. Dan berdasarkan data terbaru saat ini penerima manfaat PKH berjumlah 150 jiwa. Yang berdasarkan data tersebut menunjukkan penurunan dari awal tahun dilaksanakannya PKH di Desa Cakru. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan banyak manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), utamanya dalam meningkatkan taraf kehidupan keluarga melalui kemudahan mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, mengurangi angka kemiskinan, menciptakan

perubahan kemandirian dan perilaku keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan pendapatan keluarga, serta mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu peran dari pengadaan program PKH ini sangatlah penting untuk membentuk keluarga sejahtera. Ujung dari keberhasilan dari pelaksanaan PKH dapat dilihat dari jumlah Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM), yaitu proses berakhirnya kepesertaan penerima PKH karena mereka sudah tidak termasuk dalam kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ada pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat dalam penelitian ini untuk penelitian di masa selanjutnya. Salah satu manfaatnya yaitu pada bidang akademik adalah untuk mendapatkan gambaran dan mampu meningkatkan pengetahuan tentang efektivitas dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Adapun manfaat lain dari penelitian ini adalah manfaat secara praktis maupun secara teoritis yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan sumbangan pemikiran atau ilmu untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu mampu menjadi kajian yang dapat dijadikan untuk pedoman selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan peran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi pihak pemerintahan dan Dinas Sosial dalam upaya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dapat menjadi sumber informasi tentang faktor penghambat yang dihadapi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan baik dari segi kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial khususnya bagi lansia dan penyandang disabilitas di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.